



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUHI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 7853

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/52 m2 di SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/52 m2 di SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 308.500.000

1. MOBIL, SUZUKI CARRY MINI BUS Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 257.500.000
5. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 62.330.762

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.172.580.762

III. HUTANG Rp. 210.399.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 962.181.162



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Desember 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.